



Evaluasi Kebijakan Moda Transportasi Si Benteng di Kota Tangerang (Studi Kasus PT. Tangerang Nusantara Global)

¹Siti Zahra Nuramalia, ²Muhammad Ibrahim Rantau

^{1,2}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

Abstract

Received: 11 Desember 2023
Revised: 15 Januari 2024
Accepted: 07 Februari 2024

Sarana transportasi atau transportasi publik merupakan salah satu fasilitas yang sangat penting dan wajib disediakan. Moda transportasi ini harus merata di seluruh tanah air untuk mempercepat laju pembangunan. Transportasi melalui jalan darat merupakan moda transportasi yang paling dominan jika dibandingkan dengan moda lainnya karena dianggap paling efektif oleh masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global Dalam Pengelolaan Angkutan Perkotaan telah menerapkan berbagai bentuk angkutan umum untuk menunjang kegiatan sehari-hari masyarakat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tangerang, PT. Tangerang Nusantara Global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana pelayanan angkutan Si Benteng dan mengevaluasi kebijakan moda transportasi Si Benteng. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kebijakan moda transportasi Si Benteng di Kota Tangerang membawa dampak positif terhadap masyarakat karena dapat terciptanya kenyamanan, keselamatan, dan biaya terjangkau. Namun ternyata kebijakan moda transportasi angkutan kota ini belum efektif, ini terlihat kurangnya respon oleh sebagian masyarakat, kurangnya respon oleh pengelola angkutan dan pemilik angkutan untuk melakukan pemeliharaan angkutan.

Keywords: *Transportasi Publik, Evaluasi Kebijakan, Si Benteng*

(*) Corresponding Author: 1901010021@students.unis.ac.id

How to Cite: Nuramalia, S. Z., & Rantau, M. I. (2024). Evaluasi Kebijakan Moda Transportasi Si Benteng di Kota Tangerang (Studi Kasus PT. Tangerang Nusantara Global). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10653176>.

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sangat penting keberadaannya bagi aktivitas manusia khususnya di perkotaan. Sekarang, dengan adanya pilihan transportasi pekerjaan dapat diselesaikan oleh manusia dengan lebih mudah. Negara memiliki tugas dan kepentingan dalam mengatur penyelenggaraan transportasi karena peranannya yang begitu signifikan. Tujuan peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui peraturan dan kebijakan di bidang transportasi khususnya angkutan umum adalah terciptanya sistem transportasi yang dapat menjamin kelancaran, keamanan, ketepatan waktu, cepat, murah, dan nyaman bagi pergerakan orang dan /atau barang.

Salah satu komponen mendasar dari infrastruktur yang mempengaruhi perkembangan kota adalah sistem transportasi. Dalam rencana dan prakarsa pemerintah, perkembangan transportasi dan tata guna lahan sangat penting. Pengembangan infrastruktur dalam sektor transportasi pada akhirnya menimbulkan biaya tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam pembenahan atau restrukturisasi sektor transportasi menjadi hal yang mendesak.

Masyarakat bergantung pada angkutan umum yang dapat diandalkan untuk membawa orang dari satu titik ke titik lain dan untuk mobilitas. Salah satu prasyarat utama untuk pertumbuhan dan operasi kegiatan sosial ekonomi yang efisien di suatu wilayah adalah sistem transportasi yang baik. Transportasi yang aman, lancar, dan teratur selain

mencerminkan keteraturan daerah juga mencerminkan kelancaran kegiatan perekonomian daerah tersebut.

Kota Tangerang yang diarahkan sebagai kota yang berbasis perdagangan dan jasa berdampak cukup signifikan pada perkembangan kotanya. Didukung oleh kelengkapan transportasi darat, serta letaknya yang strategis yaitu menjadi salah satu jalur utama distribusi barang dan jasa skala regional dan nasional, menjadikan kota ini sebagai salah satu penggerak roda perekonomian utama di Banten.

Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya meningkatkan pelayanan fasilitas transportasi umum bagi masyarakat. Wali Kota, Pemerintah Kota Tangerang menghadirkan angkot Si Banteng dan *Bus Rapid Trans* (BRT) selain sebagai alternatif sarana mobilitas warga sekaligus sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan. Pemkot Tangerang juga terus mendorong peningkatan layanan angkutan umum di Kota Tangerang, misalnya dari segi pelayanan seperti ketepatan waktu, dan keterbatasan lahan yang dibutuhkan untuk fasilitas henti angkutan umum massal, sehingga terdapat beberapa titik fasilitas henti tidak sesuai dengan kebutuhan calon pengguna angkutan umum.

Persoalan transportasi publik yang dihadapi, Pemkot Tangerang masih terus mengevaluasi permasalahan yang ada. Dari belum efektifnya penggunaan angkutan Si Benteng, adanya perbedaan antara kebijakan dengan pelaksanaan. Pelayanan yang diberikan belum optimal, kurangnya aspek fisik dari sarana dan prasarana, seperti tempat pemberhentian yang masih tidak pada tempatnya, dan penyelenggaraan tiket yang belum efisien.

Belum meratanya keberadaan angkutan Si Benteng, persoalan lain belum optimalnya sumber daya manusia dalam mengelola Si Benteng. Serta manajemen pendukung, persoalan mengenai komponen pembiayaan, Si Benteng harus tetap memperhatikan profitabilitas, dimana pelayanan harus tetap berkualitas dengan memberikan pelayanan yang murah, pengelolaan penumpang, dan kemampuan struktur organisasi pelaksana kebijakan dalam menjalankan hubungan dengan pihak luar.

Dalam menangani masalah transportasi perkotaan termasuk angkutan kota yang kurang hati-hati dan kurang tertata serta kurang memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak akan dapat memecahkan masalah secara tepat dan baik, justru cenderung menimbulkan permasalahan baru yang kompleks dan rumit. Keadaan ini harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi/angkutan yang memadai.

Belum adanya studi evaluasi kebijakan moda transportasi angkutan Si Benteng menjadi hal yang penting untuk dilakukan, karena masyarakat sebagai pengguna angkutan publik masih merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan atau kebijakan yang ada tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Untuk melakukan evaluasi kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan Menurut (Dunn William, 2003) dalam (Natika Luki & Putri Nursyah Giffary, 2021) terdapat 6 kriteria dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan yaitu :

- a) Efektivitas, mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b) Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
- c) Kecukupan yaitu tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
- d) Pemerataan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.

- e) Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.
- f) Responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas.

Dari uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa perlu membahas dan mengkaji lebih mendalam mengenai evaluasi kebijakan moda transportasi Si Benteng di Kota Tangerang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Moda Transportasi Si Benteng Di Kota Tangerang (Studi Kasus PT. Tangerang Nusantara Global)”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi oleh Miles dan Huberman (1984). Paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kota Tangerang, sedangkan tempat penelitian adalah PT Tangerang Nusantara Global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Efektifitas Kebijakan Moda Transportasi Si Benteng

Kebijakan moda transportasi angkutan Si Benteng berjalan sesuai dengan Peraturan Walikota No 26 Tahun 2020. Peraturan Walikota No 26 Tahun 2020 untuk pengelolaan, angkutan perkotaan dikelola oleh PT. TNG kebijakannya untuk mengelola. Pemkot Tangerang melalui Dinas Perhubungan dan PT TNG menciptakan program Si Benteng ini sebagai koridor ranting yang bertugas menjadi pengumpan atau menjemput masyarakat dari dalam pemukiman menuju ke koridor cabang maupun koridor utama. Program Si Benteng juga memiliki tujuan agar terjadinya perpindahan moda transportasi yaitu masyarakat yang masih menggunakan kendaraan pribadi mulai menggunakan angkutan umum, dan diharapkan dapat mengurangi volume kendaraan agar kemacetan juga bisa teratasi terlihat membaik secara signifikan, walaupun sudah adanya program Si Benteng.

Gambar 1
Angkot Si Benteng



Sumber : (Liputan6.com, 2021)

Efisiensi Kebijakan Moda Transportasi Si Benteng

Program Si Benteng dalam pengoperasiannya bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Tangerang dan Operator Angkot Si Benteng yang beroperasi di sejumlah koridor. Dalam menjalankan program Si Benteng ini, tentunya ada hal-hal yang harus disiapkan, usaha-usaha yang disiapkan untuk terwujudnya kebijakan transportasi Si Benteng sudah dipersiapkan dengan baik, dimulai dari penyertaan modal hingga fasilitas pendukungnya. Namun, anggaran yang dikeluarkan untuk menjalankan program Si Benteng belum efisien atau masih tidak sesuai dengan yang diajukan oleh pihak pengelola. pelaksanaan program transportasi publik angkot Si Benteng bahwa kerjasama yang terjalin antara pengawas, pengelola, dan pelaksana kebijakan diketahui sudah berjalan cukup baik.

Kecukupan Kebijakan Moda Transportasi Si Benteng

Dalam kebijakan publik, kecukupan dapat didefinisikan ketika tujuan yang telah dicapai telah dianggap mencukupi dalam berbagai hal. Namun, kecukupan masih berkaitan dengan efektivitas, yang diukur seberapa jauh pilihan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang untuk menyelesaikan masalah. Kemacetan di kota Tangerang merupakan salah satu masalah yang sangat rumit untuk diatasi. Program Si Benteng dibuat dengan harapan dapat mengurangi kemacetan dan menjawab permasalahan transportasi lainnya serta memperbaiki kualitas angkutan publik. Pada realisasinya angkutan Si Benteng mengalami peningkatan penumpang namun hal tersebut masih belum membuat kemacetan di Kota Tangerang berkurang.

Tabel 1
Rekapitulasi Penumpang Angkutan Perkotaan Tahun 2021&2022

NO	BULAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	JANUARI	48,765	58,028
2	FEBRUARI	40,970	46,620
3	MARET	54,976	56,646
4	APRIL	57,411	54,346
5	MEI	57,321	59,365
6	JUNI	55,916	63,235
7	JULI	38,054	66,340
8	AGUSTUS	40,982	65,023
9	SEPTEMBER	48,172	40,000
10	OKTOBER	63,268	61,542
11	NOVEMBER	69,130	97,558
12	DESEMBER	69,335	95,729
TOTAL		644300	764432

Sumber: PT. Tangerang Nusantara Global

Perataan Kebijakan Moda Transportasi Si Benteng

Keberadaan angkot Si Benteng ini belum merata keberadaannya, pihak pengelola yaitu TNG masih berupaya menghindari adanya gesekan-gesekan dengan angkot konvensional, TNG juga masih berupaya mendapatkan rute-rute yang cukup berpotensi adanya banyak penumpang. Angkot Si Benteng hanya ada di beberapa wilayah, yaitu wilayah jatiuwung, cibodas, karawaci, periuk, sama kecamatan tangerang baru kecamatan itu belum seluruh kecamatan. Karena, konsep awal Si Benteng itu adalah angkutan pengumpan maka, rute-rute tersebut harus dari gang-gang yang akan membawa penumpang menuju jalur utama.

Gambar 2

Rute Angkot Si Benteng



Sumber : https://twitter.com/Kota_Tangerang

Ketepatan Kebijakan Moda Transportasi Si Benteng

Ketepatan mengarah pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kebijakan moda transportasi Si Benteng mengacu pada Peraturan Wali Kota No 26 Tahun 2020 tentang penugasan kepada perseroan terbatas Tangerang nusantara global dalam pengelolaan angkutan perkotaan. Ketepatan dalam kebijakan ini sudah bisa dilihat dari tujuan yang ada sudah cukup bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat menjadikan Si Benteng pilihan transportasi umum karena rutenya yang menjangkau perumahan dan harganya yang relative murah. Namun, dari kebijakan yang sudah dibuat dan juga standar operasional prosedur masyarakat masih banyak yang tidak mengikuti aturan. Fasilitas yang sudah mengalami kerusakan juga ternyata menjadi keluhan salah satu penumpang Si Benteng.

Responsivitas Kebijakan Moda Transportasi Si Benteng

Kebijakan transportasi angkutan kota Si Benteng ini mendapat respon yang baik dari masyarakat dikarenakan dengan adanya kebijakan angkutan kota ini membawa berbagai dampak positif bagi pelayanan publik karena dapat terciptanya keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Sejauh ini masyarakat sudah merasakan manfaat dari adanya Si Benteng ini, mereka merasa terbantu karena harganya yang terjangkau, dan juga fasilitasnya yang bagus. Namun, kurangnya armada masih menjadi keluhan masyarakat dan masyarakat berharap agar armada nya diperbanyak lagi. Fasilitas yang terlihat sudah rusak juga menjadi keluhan penumpang, mengakibatkan kurangnya keamanan yang dirasakan oleh penumpang. Pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, dilihat dari armada nya, harga, dan drivernya yang sudah mengikuti standar operasional membuat masyarakat cukup puas menggunakan angkot Si Benteng.

Pembahasan

Efektifitas Kebijakan Moda Transportasi Si Benteng

Efektivitas ini diartikan sebagai suatu standar dalam menilai suatu kebijakan akan terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu juga menunjukkan sejauh mana program/kegiatan atau kebijakan tersebut terlaksana secara optimal. Bahwa efektivitas dari adanya program Si Benteng diukur dari tujuan-tujuan diadakannya program ini sudah cukup terpenuhi, maka dapat dikatakan program Si Benteng berjalan secara efektif. Selain itu masyarakat juga merasakan pelayanan yang ada di Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Tangerang semenjak diterapkannya program angkutan Si Benteng ini menjadi lebih baik dan lebih berkualitas.

Efisiensi Kebijakan Moda Transportasi Si Benteng

Efisiensi dapat diartikan sebagai suatu standar untuk menilai seberapa besar persiapan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana suatu kegiatan atau kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Yang termasuk dalam efisiensi yaitu sumber daya, sumber daya adalah potensi baik dari potensi sumber daya manusia atau sarana prasarana untuk mendukung suatu kebijakan. Melihat realita di lapangan jika dikaitkan dengan indikator efisiensi ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program angkutan Si Benteng masih belum efisien. Hal tersebut dilihat dari anggaran yang diberikan melalui subsidi masih belum sesuai dengan ajuan yang diminta, maka dari itu sarana dan prasarana untuk program Si Benteng masih kurang, kemudian juga terlihat dari prosedur pelayanan dan terdapat kendala-kendala yang menyebabkan efisiensi pelaksanaan program angkutan Si Benteng kurang baik dan nantinya akan menyebabkan pencapaian tujuan-tujuan diadakannya program ini menjadi tidak maksimal.

Kecukupan Kebijakan Moda Transportasi Si Benteng

Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan serta kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Program angkutan Si Benteng dibuat dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan, meningkatkan kualitas angkutan kota, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan publik, serta mengurangi kemacetan. Program angkutan Si Benteng merupakan salah satu alternatif yang ada yang dapat memuaskan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. Pada kenyataan di lapangan ternyata program Si Benteng belum bisa menjadi alternative untuk mengatasi permasalahan transportasi yang ada di Kota Tangerang. Berdasarkan realita di lapangan tujuan tersebut sudah ada yang terpenuhi, namun jika dilihat dari pengertian indikator kecukupan yang diungkapkan William Dunn, masih belum relevan signifikan dengan kenyataan di lapangan karena masih ada masalah dalam kualitas angkutan kota seperti tidak dijaganya fasilitas yang sudah diberikan, perawatan yang kurang maksimal, kesadaran masyarakat dalam menggunakan transportasi publik juga masih belum terlihat karena persoalan kemacetan masih belum terlihat secara signifikan walaupun dengan adanya angkutan Si Benteng, persoalan lain mengenai ketegasan dalam memberi layanan, persepsi masyarakat yang menggampangkan layanan yang diberikan membuat kebijakan yang sudah dibuat jadi tidak terlaksana secara optimal.

Perataan Kebijakan Moda Transportasi Si Benteng

Pemerataan oleh William Dunn memiliki arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Perataan dilihat dari seluruh sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai, apakah sudah diberikan merata kepada seluruh kelompok yang membutuhkan. Berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa angkutan Si Benteng keberadaannya masih belum merata, angkutan Si Benteng hanya tersedia di 5 kecamatan, yaitu kecamatan Jatiuwung, Cibodas, Karawaci, Periuk, dan kecamatan Tangerang. Pihak pengelola TNG bersama Dinas Perhubungan Kota Tangerang masih melakukan evaluasi, mencari rute yang terlihat potensi banyak ditemukannya penumpang, dan yang sesuai dengan konsep angkutan Si Benteng sebagai *feeder* yaitu angkutan pengumpan yang menjemput penumpang dari area pemukiman menuju jalur utama. Selain itu permasalahan masih banyaknya angkot konvensional, membuat TNG harus lebih berhati-hati dalam menyediakan Si Benteng agar tidak terjadi gesekan antara angkutan kota yang disediakan pemerintah dengan angkutan konvensional.

Ketepatan Kebijakan Moda Transportasi Si Benteng

Ketepatan berkaitan dengan seberapa jauh tujuan tersebut telah mampu berguna dan bernilai untuk kepentingan masyarakat. Dengan angkutan kota yang lebih dekat dengan masyarakat dan harga murah, masyarakat tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan transportasi umum yang lebih mahal. Selain itu jika melihat pencapaian program ini masyarakat yang menggunakan angkutan Si Benteng jadi semakin meningkat tiap tahunnya, melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa program ini merupakan alternative untuk menjawab permasalahan masyarakat. Karena dengan kebijakan angkutan kota ini secara otomatis menjadi suatu perbaikan bagi kualitas transportasi umum di Kota Tangerang ini khususnya untuk angkutan kota.

Responsivitas Kebijakan Moda Transportasi Si Benteng

Responsivitas menurut William Dunn adalah berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan atau niali kelompok-kelompok masyarakat. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa indikator responsivitas ini juga penting untuk menjadi salah satu standar penilaian keberhasilan suatu kebijakan. Kebijakan transportasi Si Benteng ini mendapat respon yang baik dari masyarakat dikarenakan dengan adanya kebijakan ini membawa berbagai dampak positif bagi pelayanan transportasi publik karena dapat terciptanya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Dengan adanya angkutan Si Benteng ini masyarakat merasa difasilitasi, mereka puas karena dipermudah dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa program ini sudah memenuhi beberapa kebutuhan dari masyarakat yang merasa puas dengan keberadaann angkutan Si Benteng walaupun masih terdapat permasalahan yang menyebabkan aturan tidak berjalan dengan semestinya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan moda transportasi angkutan Si Benteng di Kota Tangerang ini sudah mencapai beberapa tujuan yang diinginkan, dengan adanya angkutan Si Benteng ini kualitas angkutan kota di Kota Tangerang sudah meningkat. Tujuan-tujuan dari diadakannya program ini sudah berhasil terpenuhi, selain itu masyarakat juga merasakan pelayanan yang ada di Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Tangerang semenjak diterapkannya program angkutan Si Benteng ini menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Angkutan Si Benteng yang dibentuk dengan unik, memiliki fasilitas yang memadai, dan harga yang murah menjadikan angkutan Si Benteng ini pilihan bagi masyarakat. Pencapaian program angkutan Si Benteng ini masyarakat yang menggunakan Si Benteng semakin meningkat setiap tahunnya, melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa program ini merupakan jawaban untuk permasalahan transportasi. Standar operasional prosedur yang dijalankan dengan baik oleh para supir juga menjadikan masyarakat nyaman berpergian dengan menggunakan Si Benteng. Namun, kurangnya armada masih menjadi keluhan bagi masyarakat dan juga rute perjalanan yang dianggap masih pendek-pendek. Fasilitas yang sudah rusak di beberapa armada juga menjadi keluhan masyarakat, karena hal tersebut dianggap kurangnya perawatan atau perbaikan terhadap fasilitas yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel :

- Akhmad Alia Khabib. (2015). *Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta)*. *JURNAL ILMIAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI*, 47.
- Dewi Ulfah Nabila. (2017). *Efektivitas Pelayanan Transportasi Publik (Studi Kasus : BRT Mamminasata)*. UNIVERSITAS HASANUDDIN.

- Handayani Sabrina, Afrianti Angga Dessy, & Suryandari Mega. (2021). *Implementasi Kebijakan Angkutan Umum Di DKI Jakarta. Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik.*
- Hasibuan Tanggor. (2013). *Evaluasi Program DIKLAT Diluar Balai (Studi Kasus DIKLAT Ditempat Kerja Tata Persuratan Pada Kantor Kementerian Agama Binjai Tahun 2013).* Jurnal Administrasi Publik.
- Krisnina Marsha Lafitra. (2017). *Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan Dan Manajemen Publik.*
- Lutfii Ahmad. (2022). *Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID 19 Di Kota Makassar.* UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
- Nainggolan Cellyana Agnes, Sopwan Imam, Auliah Nurul, Ni'matullah, & Hasanuddin Adien. (2020). *Polemik Kebijakan Transportasi Online. JDKP (JURNAL DESENTRALISASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK) .*
- Natika Luki, & Putri Nursyah Giffary. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Umum dan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang.* [Http://Ejournal.Unsub.Ac.Id/Index.Php/Publik](http://Ejournal.Unsub.Ac.Id/Index.Php/Publik), 3(1).
- Pramono Joko. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo, Ed.; 1st ed.). UNISRI Press.
- Putri Hartiyanti Esti, Soeady Saleh. Moch, & Hayat Ainul. (2013). *Evaluasi Kebijakan Peremajaan Angkutan Kota Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang).* Jurnal Administrasi Publik (JAP).
- Sirajuddin, I. A. (2014). *Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar.*
- Situmorang H. Chazali. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)* (Permatasari Amanda Iman, Ed.). Social Security Development Institute.
- Suyatna Uyat. (2018). *Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia.* Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora.
- Buku Elektronik:**
- Agustino Leo. (2008). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik.* Alfabeta.
- Anggara Sahya. (2018). *Kebijakan Publik.* PUSTAKA SETIA Bandung.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* PT Pustaka Pelajar.
- Fatimah Siti. (2019). *Pengantar Transportasi.* Myria Publisher.
- Handoyo Eko. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose, Ed.; 1st ed.). Widya Karya.
- Hidayatulloh Nururrochman, Soetijono Kurniawan Irwan, & Asmarianti. (2020). *Teori Administrasi Publik* (Simarmata Janner, Ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Ibrahim. (2007). *Teori Administrasi Publik.*
- Pasolong. (2007). *Administrasi Publik.*
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23rd ed.). ALFABETA.
- Web Page :**
- https://twitter.com/Kota_Tangerang
(Liputan6.com, 2021)